

FILANTROPI DI INDONESIA

Ringkasan

Pengantar

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dan memiliki keragaman yang tinggi dalam agama, budaya dan etnis. Beragam bentuk derma berkembang di negara ini selama berabad-abad, dengan nilai-nilai agama – baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghuchu – maupun kepercayaan tradisional sebagai pendorong utamanya. Indonesia juga merupakan negara dengan populasi muslim terbesar.

Pada akhir dekade 1980-an dan awal 1990-an, bentuk filantropi yang lebih modern dengan manajemen profesional mulai berkembang. Pada periode ini mulai tumbuh Lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan keluarga, dan lembaga zakat formal. Rezim Order Baru Soeharto selama 32 tahun dari tahun 1966 hingga 1998, tidak memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi secara politik, namun yayasan dapat menangani isu-isu sosial. Selama Orde Baru, juga muncul filantropi berbasis media, yang berfokus pada penanganan bencana alam. Menyusul Krisis Asia 1997, yang memicu kejatuhan rezim Orde Baru, dimulailah era Reformasi yang membawa banyak perubahan dan mempengaruhi banyak kehidupan termasuk filantropi.

Masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis menyediakan lahan subur untuk pertumbuhan filantropi. Jumlah jaringan lembaga, baik yang dikelola negara maupun tidak, yang dibentuk untuk mengelola pengumpulan zakat berkembang pesat. Organisasi-organisasi media memperluas upaya penggalangan dana mereka dan membentuk yayasan sendiri untuk mengatur dana yang digalang. Undang-undang Yayasan yang disahkan pada 2001

PHILANTHROPY IN INDONESIA

A working paper

Caroline Hartnell



Philanthropy for Social Justice and Peace

in association with Alliance, Filantropi Indonesia, Indonesia for Humanity and WINGS

memungkinkan yayasan beroperasi dalam kerangka hukum yang kuat. Yayasan-yayasan perusahaan dan keluarga makin banyak didirikan sebagai bagian dari kelompok bisnis keluarga. Semakin banyak organisasi beralih dari filantropi informal dan tanpa struktur menuju ke sistem manajemen yang modern. Kolaborasi dan kemitraan dibentuk dalam rangka merespon tantangan yang semakin sulit. Dengan teknologi digital yang semakin mendominasi aspek sosial ekonomi, generasi muda – sering disebut generasi milenial – mulai bermunculan di sektor filantropi. Mereka memperkenalkan cara-cara inovatif dalam aktivitas filantropi, menggabungkan gairah, kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial, serta kewirausahaan sosial.

Di luar berbagai perkembangan dalam filantropi institusional, filantropi individual di Indonesia masih cenderung bersifat *ad hoc* dan tidak terstruktur, lebih berdasar pada keimanan dan preferensi pribadi, daripada penilaian objektif terhadap kebutuhan masyarakat.

Philanthropy in Indonesia adalah satu dari serangkaian makalah kerja yang dibuat oleh Philanthropy for Social Justice and Peace (PSJP). Makalah ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai filantropi di Indonesia saat ini. Makalah ini berdasarkan perbincangan dengan orang-orang yang terlibat dalam upaya mendorong, mendukung, ataupun memperkuat beragam wilayah filantropi. Makalah ini merupakan suatu karya yang masih berjalan, bukan sebuah dokumen yang sudah selesai.

Apa saja bentuk filantropi yang saat ini ada di Indonesia?

Filantropi lembaga sekuler

Filantropi perusahaan

Yayasan perusahaan di Indonesia didominasi oleh perusahaan besar nasional dan multinasional yang sebagian besar dibentuk untuk mengelola kegiatan CSR (*corporate social responsibility*/tanggung jawab sosial perusahaan). Awalnya CSR merupakan inisiatif perusahaan yang bersifat sukarela, namun Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 mewajibkan seluruh perusahaan publik untuk mengalokasikan anggarannya untuk program CSR.

Wilayah yang didukung yayasan perusahaan biasanya adalah yang relevan dengan usaha mereka. Contohnya, program Yayasan Adaro berfokus untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di sekitar wilayah operasi perusahaan – Adaro adalah salah satu perusahaan tambang batu bara dan energi terbesar Indonesia. Banyak yayasan perusahaan yang memberikan dukungan untuk

pendidikan, sejalan dengan anjuran pemerintah. Program lain yang populer adalah lapangan kerja, kewirausahaan, dan yang makin banyak, lingkungan.

Filantropi media

Filantropi media adalah bagian penting dari filantropi perusahaan. Sejak masa Orde Baru, organisasi media telah mengumpulkan donasi dari publik saat terjadi bencana alam besar. Menyusul terjadinya tsunami pada Desember 2004, perusahaan-perusahaan media membentuk forum untuk mengkoordinasi upaya rekonstruksi dan rehabilitasi. Sejak itu, perusahaan-perusahaan media mengubah pendekatannya, dari pengumpulan donasi untuk kejadian tak terduga, ke perencanaan dan pelaksanaan program untuk menangani serangkaian isu sosial.

Filantropi keluarga

Ada tradisi berderma di keluarga-keluarga kaya yang beberapa di antaranya mendirikan yayasan. Yayasan-yayasan keluarga ini umumnya melaksanakan kegiatan dermanya sendiri dan tidak memberi dana hibah ke organisasi lain, kecuali segelintir yayasan. Seperti yayasan perusahaan, yayasan keluarga cenderung mendukung pendidikan, seringkali dalam bentuk beasiswa, dan kesehatan.

Beberapa yayasan keluarga bekerjasama dengan pemerintah, khususnya di tingkat daerah. Yayasan Tanoto, misalnya, sangat mementingkan kerjasama dengan pemerintah, karena mempertimbangkan bahwa yayasan hanya dapat berdampak di tingkat nasional bila mereka bekerjasama dengan atau dapat mempengaruhi pemerintah.

Pemberian Hibah di Indonesia

Beberapa yayasan di Indonesia memberi hibah bagi organisasi lain dan beberapa melaksanakan programnya sendiri. Beberapa yayasan melakukan keduanya, memberi hibah bagi LSM yang dianggap memiliki keahlian dan pengalaman yang tidak mereka miliki.

Ada pula organisasi pemberi hibah perantara yang menyalurkan sumber daya, baik dari organisasi filantropi internasional maupun organisasi filantropi besar serta perusahaan dari dalam negeri. Beberapa dari organisasi ini adalah:

- **Indonesia untuk Kemanusiaan**, didirikan pada tahun 1995 oleh para aktivis Indonesia untuk mendukung hak asasi manusia dan keadilan sosial, dengan dukungan dari organisasi donor Eropa.
- **Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia**, juga dikenal sebagai KEHATI, didirikan pada tahun 1995 untuk membantu konservasi sumber daya keanekaragaman hayati Indonesia dan pemanfaatannya secara berkelanjutan.

- **Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan**, juga dikenal sebagai Kemitraan, didirikan pada Maret 2000 sebagai proyek UNDP untuk membantu Indonesia mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di seluruh tingkatan pemerintah.
- **Yayasan Tifa**, didirikan pada tahun 2000 dalam kemitraan dengan Open Society Institute untuk mempromosikan prinsip-prinsip masyarakat terbuka di Indonesia.

Baik KEHATI maupun Kemitraan mengelola dana yang signifikan dari sumber pemerintah asing.

Penyandang dana internasional

Di awal era Reformasi, bantuan internasional dalam jumlah besar disalurkan ke Indonesia untuk mendukung proses demokratisasi. Seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia, pendanaan internasional untuk tujuan-tujuan berbasis hak mulai berkurang, tetapi donor internasional, termasuk lembaga bilateral, badan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dan beberapa yayasan internasional, masih menjadi penyandang dana terbesar, karena volume dan ukuran sumbangan mereka. Perubahan iklim adalah salah satu bidang di mana pendanaan internasional meningkat.

Filantropi berbasis agama

Agama masih menjadi motivasi utama dalam kegiatan derma di Indonesia. Filantropi berbasis agama tumbuh jauh lebih pesat dibandingkan dengan filantropi sekuler.

Filantropi Islam tradisional

Filantropi Islam didasarkan pada konsep zakat, yaitu amal yang diwajibkan, dan infak dan sedekah yang bersifat sukarela. Walaupun zakat dari penghasilan dan harta diwajibkan bagi umat Islam, di Indonesia negara tidak memaksa orang Islam untuk membayarkannya. Banyak muslim yang menyalurkan amalnya secara langsung kepada yang membutuhkan, atau memberikannya ke masjid. Para narasumber studi ini meyakini bahwa potensi zakat yang besar masih belum tersentuh.

Sejak Orde Baru, pemerintah mencoba mendorong pembayaran zakat ke organisasi resmi. Pengelolaan zakat oleh organisasi ini menciptakan sumber daya untuk mendukung inisiatif jangka panjang yang menjawab permasalahan mendasar penyebab kemiskinan dan isu-isu sosial lain. Baik disalurkan melalui organisasi resmi maupun tidak, praktik filantropi yang begitu meluas di Indonesia ini telah memungkinkan beragam lembaga untuk mengumpulkan dana dari masyarakat muslim.

Lembaga pengelola Zakat

Pada tahun 1999, UU Pengelolaan Zakat mengamanatkan pemerintah untuk membentuk lembaga pengelolaan zakat negara yang dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di berbagai tingkatan pemerintah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan zakat. Jumlah lembaga yang dibentuk meningkat dari kurang dari 10 pada tahun 2000 menjadi 549 pada tahun 2015-2018. Lembaga-lembaga ini menggunakan dana zakat untuk disalurkan kepada yang membutuhkan; mereka juga memiliki program-program kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan beasiswa.

Selain BAZNAS, ada pula lembaga pengelolaan zakat non-pemerintah (Lembaga Amil Zakat atau LAZ), yang pertama kali didirikan pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an. Pada tahun 1997, Forum Zakat dibentuk oleh 11 LAZ. Jumlah LAZ di Indonesia saat ini diperkirakan lebih dari 600. Salah satu LAZ pertama adalah Dompot Dhuafa yang didirikan pada tahun 1993 atas inisiatif para wartawan Republika, surat kabar berbasis Islam terbesar, dan kini menjadi lembaga pengelola zakat terbesar di Indonesia. Kebanyakan lembaga zakat menjalankan programnya sendiri alih-alih memberikan hibah ke organisasi lain.

Filantropi keadilan sosial

Sangat sedikit organisasi pemberi hibah yang didirikan khusus untuk mendukung tujuan-tujuan berbasis hak. Indonesia untuk Kemanusiaan, Social Trust Fund, Yayasan Yasmin, *Pundi Perempuan* (dana perempuan yang dikelola oleh Indonesia untuk Kemanusiaan) dan Yayasan Tifa merupakan sedikit pengecualian. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kelompok berbasis hak dan keadilan sosial adalah dukungan dari publik Indonesia.

Filantropi berbasis agama (Islam) di Indonesia pada umumnya berfokus pada umat agama itu sendiri, dan kelompok konservatif bersikeras bahwa zakat tidak dapat diberikan kepada umat agama lain. Akibatnya, potensi filantropi progresif – dalam arti menerima prinsip non-diskriminatif dalam penyaluran dana – menjadi terbatas. Filantropi Islam progresif, oleh sebab itu, lebih dapat ditemui di organisasi kemanusiaan Islam, dibandingkan di organisasi pengelola zakat.

Meskipun demikian, sebagian besar organisasi filantropi Islam telah memperluas kegiatan mereka ke dalam program-program pendidikan, kesehatan, penanggulangan bencana, ekonomi, dan sosial-keagamaan, dan beberapa organisasi pionir seperti Dompot Dhuafa juga mendukung kegiatan advokasi – secara umum di Indonesia dianggap sebagai ‘senjata andalan untuk menciptakan perubahan di tingkat akar rumput’. Hal ini karena kebijakan pemerintah sering dipandang sebagai penyebab utama ketidakadilan, sehingga advokasi dipandang sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat

yang adil. Forum Zakat (FOZ) telah berperan penting dalam mendukung gagasan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk kegiatan kemanusiaan tanpa diskriminasi kelompok atau pun agama.

Wirausaha sosial dan investasi sosial

Dari 340.000 wirausaha sosial di Indonesia, lebih dari 80 persennya didirikan sejak tahun 2012. Sebagian besar adalah usaha kecil dengan rata-rata pendapatan Rp 806 juta (USD 57,467) per tahun. Sebagian dibentuk oleh organisasi masyarakat yang masih bergantung pada sumber dana internasional namun ingin menghasilkan pendapatan dari kegiatan mereka sendiri. Banyaknya pendukung (pembangun ekosistem, inkubator, akselerator, pembangun kapasitas) menunjukkan tren bahwa wirausaha sosial makin berkembang pesat.

Tiga sumber dana utama bagi wirausaha sosial adalah pendapatan pribadi dari pekerjaan lain, pendanaan dari keluarga atau teman, dan donasi dalam bentuk uang atau barang. Bagi wirausaha sosial dalam tahap berikutnya, investasi sosial (*impact investing*) adalah sumber investasi yang potensial.

Indonesia adalah pasar terbesar investasi sosial di Asia Tenggara. Namun demikian, hanya tujuh pendanaan yang memiliki kehadiran penuh di dalam negeri, dan masih ada kesenjangan pendanaan bagi investasi kecil pada tahap awal. Kesenjangan ini sebagian diisi oleh pembentukan dan perkembangan Angel Investment Network Indonesia (ANGIN) dan sejumlah inkubator yang menyediakan modal awal. Dibentuk pada tahun 2012, ANGIN menjadi jaringan *angel investor* terbesar di Indonesia, dengan 66 anggota, termasuk di antaranya lembaga investor sosial, yang terlibat dalam investasi dan pendampingan tahap awal.

Filantropi individu

Indonesia berada di puncak CAF World Giving Index untuk pertama kalinya di tahun 2019 sebagai negara dengan proporsi penduduk terbesar di dunia yang terlibat dalam kegiatan kerelawanan, dengan 78 persen penduduk yang mendonasikan uang dan 53 persen menyumbangkan waktu. Kerelawanan memiliki akar yang kuat di budaya Indonesia.

Seperti yang kita ketahui, filantropi media sangat didorong oleh derma individu, di mana perusahaan media menghimpun kontribusi publik, khususnya untuk penanggulangan bencana alam besar. Perintah agama untuk berderma merupakan motif bagi sebagian besar derma, misalnya muslim yang membayar zakat dan bentuk sedekah lain kepada lembaga pengelola zakat negara maupun non-negara. Teknologi digital dan internet mempermudah publik untuk memberi baik untuk isu tradisional maupun non-tradisional seperti inisiatif oleh aktivis dan seniman muda.

Crowdfunding dan derma daring

Secara umum, derma daring (*online giving*) masih berada dalam tahap awal. Namun, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengguna internet dan media sosial terbanyak di dunia, generasi muda memulai inisiatif *crowdfunding*. Didirikan pada tahun 2013, Kitabisa.com adalah *platform crowdfunding* terbesar. Tujuan utama yang didukung adalah untuk kesehatan, disusul dengan kemanusiaan dan derma keagamaan.

Penggalangan dana dari publik

Saat ini, selain dari perusahaan media dan lembaga zakat, penggalangan dana di Indonesia umumnya dilakukan oleh LSM besar. Termasuk kelompok lingkungan dengan jaringan internasional seperti Greenpeace, The Nature Conservancy dan WWF, lalu Save the Children, yang semuanya sudah membentuk badan hukum sendiri di Indonesia, serta SOS Children Village, Indonesia untuk Kemanusiaan dan YAPPIKA-ActionAid. Semuanya menysasar derma reguler dan juga sumbangan satu kali (*one-off*). Organisasi internasional akan melanggar hukum jika mereka menggalang dana lokal kecuali mereka mendirikan yayasan berbadan hukum yang independen.

Apakah individu mendukung tujuan keadilan sosial?

Penggalangan dana publik untuk mendukung usaha berbasis hak menjadi tantangan, dan tidak menjadi lebih mudah dengan maraknya konservatisme agama dan intoleransi belakangan ini. Social Trust Fund cukup berhasil dengan pendekatan kombinasi – menggabungkan penggalangan dana arus utama untuk bencana dengan fokus setidaknya jangka menengah seperti pemberian beasiswa (yang mereka sebut beasiswa kemanusiaan). Pembingkai (*framing*) isu juga penting. Ormas perlu membangun narasi yang mampu dipahami oleh masyarakat umum—membangkitkan isu hak asasi manusia tidak sebagai nilai politis atau yang mengandung nilai Barat, melainkan sebagai bagian dari budaya Indonesia. Orang-orang juga dapat berderma secara langsung melalui Kitabisa.com untuk kasus spesifik, misalnya untuk membela seorang nenek yang dipenjara karena mengambil biji kakao.

Pakar filantropi Amelia Fauzia mengutip survey di tahun 2003 yang menunjukkan adanya potensi muslim Indonesia untuk mendukung tujuan-tujuan keadilan sosial. Lebih dari 65 persen responden setuju ‘pentingnya memperoleh dan mempertahankan hak, kesetaraan pendapatan, hak perempuan, hak minoritas, dan kebebasan berekspresi’, sementara 77 persen tidak bermasalah dengan gagasan berderma kepada orang lain tanpa melihat agamanya. Konsep keadilan sosial berakar pada ideologi negara Pancasila, khususnya sila kelima, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.

Angka-angka mengenai derma tidak begitu menggembirakan. Ada 94 persen muslim menyumbang ke organisasi keagamaan, sementara hanya 3 persen

yang menyumbang ke organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), 11 persen ke organisasi perempuan, dan 11 ke organisasi lingkungan.

Namun demikian, pendekatan baru terhadap isu-isu berbasis hak dan keadilan sosial dipelopori oleh generasi muda, dibantu dengan teknologi informasi. Kaum milenial tampaknya lebih sensitif terhadap isu-isu lintas budaya/ras/gender. Demografi Indonesia menjadikan tren ini signifikan: 60 persen dari populasi Indonesia berusia di bawah 30 tahun.

Infrastruktur filantropi

Organisasi Infrastruktur

Organisasi kunci dalam ekosistem pendukung filantropi adalah perhimpunan filantropi nasional Filantropi Indonesia yang didirikan pada tahun 2007. Sejak 2015, perhimpunan ini telah berperan penting dalam menyelaraskan upaya-upaya filantropi dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Filantropi Indonesia juga menyediakan sejumlah layanan bagi lembaga-lembaga filantropi, seperti *Philanthropy Learning Forum* dan sesi berbagi keterampilan, dan telah mengembangkan klaster filantropi untuk memperkuat pembelajaran sejawat dan kemitraan di antara organisasi yang bergerak di bidang yang sama seperti pendidikan, nutrisi, seni dan budaya, pelestarian lingkungan dan pemukiman.

Dua perhimpunan nasional lain adalah Forum Zakat (FOZ), perhimpunan lembaga zakat yang dibentuk pada tahun 1997 dan Konsil LSM Indonesia. Organisasi penting lain adalah Institut Manajemen Zakat (IMZ), yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia lembaga-lembaga zakat.

Secara keseluruhan, infrastruktur filantropi di Indonesia masih jauh dari memadai. Saat ini hanya ada sedikit organisasi (ormas atau berbasis universitas) dengan minat pada penelitian filantropi, dan firma penasehat swasta dan firma hukum dengan fokus khusus pada filantropi hampir tidak ada.

Kerangka hukum dan fiskal

Sejak 1998 dan jatuhnya Orde Baru, telah diterbitkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berdampak pada sektor filantropi. Beberapa yang utama adalah:

- **Undang-Undang tentang Yayasan**, diterbitkan pada tahun 2001 dan direvisi pada tahun 2004, yang menciptakan basis hukum yang jelas bagi yayasan.
- **Peraturan Pemerintah No 93/2010 (GR-93)** tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, diterbitkan pada tahun

2010, yang memberikan insentif pajak untuk sumbangan dalam sejumlah area tertentu.

- **Undang-Undang No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas**, yang mewajibkan perusahaan publik untuk mengalokasikan anggaran untuk program-program CSR.
- **Undang-Undang Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan** yang saat ini menjadi aspek paling problematik dalam kerangka hukum terkait filantropi, yang mengatur dan membatasi kegiatan ormas.

Apa yang mendorong pertumbuhan filantropi di Indonesia?

Para narasumber menyebutkan sejumlah faktor: bahwa pemerintah memandang filantropi secara positif; menguatnya komitmen lembaga zakat dalam memberi untuk pembangunan, termasuk untuk SDGs; semakin besarnya komitmen perusahaan dan keluarga untuk berkontribusi terhadap pembangunan negara; masih besarnya tantangan untuk menyejahterakan masyarakat meskipun Indonesia mengalami kemajuan ekonomi dalam 10-20 tahun terakhir; adanya keinginan dari keluarga-keluarga berada untuk mewariskan Indonesia yang lebih baik bagi anak cucu mereka. Empat faktor yang tampaknya sangat penting dalam mendukung pertumbuhan filantropi di Indonesia adalah:

- **SDGs.** Filantropi kelembagaan di Indonesia semakin menyelaraskan kegiatan mereka dengan SDGs. Filantropi Indonesia yang menjadi *focal point* untuk SDGs Philantropy Platform, telah menjalankan kampanye besar tentang SDGs sejak 2015. Makin lazim lembaga filantropi menyelaraskan kegiatan mereka dengan satu atau lebih tujuan SDGs. Kerangka umum seperti SDGs membantu lembaga filantropi untuk saling belajar dan berkolaborasi dengan mitra lainnya yang memiliki tujuan yang sama.
- **Bencana alam.** Kebanyakan orang pertama kali terlibat dalam filantropi saat merespon kejadian bencana alam. Pada awal tahun 1980-an, Harian Kompas memulai penggalangan publik merespon letusan gunung api di Jawa Barat. Tahun 1993 surat kabar Republika mendirikan Dompot Dhuafa setelah gempa besar mengguncang Sumatra. Sejak saat itu, perusahaan media lain telah mengikuti jejak mereka, dan dana zakat semakin sering disalurkan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Semakin banyaknya bencana alam yang menimpa Indonesia, *crowdfunding* dan permintaan *ad hoc* menjadi saluran yang penting untuk mengaktivasi donasi.

- **Sikap kaum milenial.** Kaum milenial melanjutkan kegiatan filantropi orang tua atau keluarga mereka, namun dengan cara yang berbeda. Mereka melakukan *crowdfunding* dalam rangka menggalang dana untuk tujuan-tujuan yang mereka pedulikan; merekalah kekuatan penggerak potensial di balik pertumbuhan filantropi keadilan sosial dan berkembangnya wirausaha sosial.
- **Teknologi** Semakin banyaknya saluran untuk penggalangan dana secara digital adalah alasan besar mengapa penggalangan dana mulai bekerja. Saluran-saluran ini di antaranya adalah Facebook dan aplikasi seperti GoPay – Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna Facebook dan Twitter terbanyak di dunia. Teknologi juga memberikan akses bagi masyarakat terhadap informasi tentang ketidakadilan – yang berpotensi menjadi langkah pertama menuju pemberian dukungan untuk tujuan-tujuan keadilan sosial. Teknologi juga menjadi faktor besar dalam filantropi kebencanaan.

Apa yang menghambat filantropi di Indonesia?

Di balik kemajuannya, filantropi di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal. Meskipun pemerintah menyadari bahwa filantropi dapat berkontribusi terhadap pembangunan nasional, pemerintah belum menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk memastikan sektor ini dapat berkembang. Filantropi juga biasanya tidak menjadi prioritas utama untuk keluarga/bisnis. Rasa tidak percaya yang berkepanjangan terhadap masyarakat sipil, ditambah dengan meningkatnya konservatisme dan politik identitas, telah berdampak negatif terhadap filantropi keadilan sosial.

Kerangka hukum yang tidak memadai

Terdapat sejumlah permasalahan dalam hal ini:

- Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan memberikan kekuasaan yang cukup besar kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengendalikan masyarakat sipil.
- Insentif pajak, yang umumnya dipandang tidak memadai, dengan tujuan-tujuan yang terbatas dan batasan jumlah sumbangan yang rendah. Regulasi yang tidak jelas menyebabkan pengurangan pajak yang diperoleh seringkali tidak sepadan dengan upaya yang harus dikeluarkan.
- Pengurangan pajak hanya disediakan untuk lima jenis program CSR, yang berarti bahwa perusahaan tidak dapat mengklaim pengurangan pajak untuk program-program CSR strategis yang mendukung agenda nasional.

- Undang-Undang No. 9/1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang sudah usang dan saat ini tengah direvisi. Revisi UU yang baru masih belum mempertimbangkan revolusi digital yang terjadi saat ini, termasuk efektivitas media sosial untuk menghimpun donasi dari publik.
- Tidak ada dasar hukum yang spesifik untuk wirausaha sosial.

Kapasitas organisasi yang rendah

Kapasitas organisasi yang terbatas merupakan masalah yang dialami yayasan maupun ormas. Bagi yayasan keluarga dan perusahaan, isu yang dihadapi antara lain berhubungan dengan mempekerjakan SDM profesional untuk menjalankan yayasan, mengembangkan dan mengelola dana, serta kapasitas pemberian hibah dan manajemen dewan. Rendahnya kecakapan manajerial juga merupakan isu bagi wirausaha sosial, setelah sulitnya mendapatkan modal (utang/ekuitas). Perusahaan sosial membutuhkan lebih banyak dukungan untuk mencari pendanaan yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangannya.

Masalah dalam investasi sosial

Di samping kesiapan investasi sosial untuk perusahaan sosial, permasalahan terbesar di sisi investor adalah bahwa sebagian besar pendanaan masih berasal dari luar negeri, dan saat ini usaha skala kecil dan menengah dan perusahaan sosial tidak dapat menerima pendanaan luar negeri. Masalah lain adalah kurangnya penjualan yang berhasil.

Potensi filantropi di Indonesia

Sebagian besar narasumber optimistis tentang potensi filantropi di Indonesia. Setelah mengalami krisis besar di akhir 1990-an, perekonomian telah membaik. Meningkatnya kesejahteraan dan masalah-masalah yang masih ada menjadi dasar yang kuat untuk pertumbuhan filantropi di Indonesia ke depan. Kaum muda peduli terhadap lingkungan, pendidikan, dan kesehatan, dan mulai menghasilkan uang sendiri. Donasi publik marak di masyarakat seluruh Indonesia.

Filantropi perusahaan dan keluarga

Ada banyak potensi untuk filantropi keluarga, dengan kesejahteraan yang makin meningkat dan bertumbuhnya tren untuk memberi kembali melalui filantropi. Dengan pertumbuhan *start-up* dan investor asing di Indonesia, masa depan filantropi perusahaan juga tampak menjanjikan. Perusahaan media khususnya memiliki potensi yang sangat besar untuk menggalang dana dari publik untuk tujuan-tujuan kemanusiaan.

Seperti di negara-negara lain, sumber daya yang dimiliki sektor filantropi relatif kecil dibandingkan yang dimiliki pemerintah dan swasta. Untuk menciptakan

dampak bermakna, para pelaku filantropi perlu menemukan ceruk yang tepat dan menggunakan sumber daya secara efektif. Penanggulangan bencana, pendidikan, dan seni dan budaya adalah tiga wilayah yang menjanjikan. Tujuan lain adalah kohesi sosial, yang sangat penting dalam negara dengan begitu banyak suku, bahasa, dan agama. Lingkungan dan perubahan iklim juga membutuhkan campur tangan yang mendesak. Filantropi telah lama mendukung tujuan-tujuan lingkungan. Kini, dukungan perlu diperluas untuk kegiatan advokasi dan upaya perlindungan lingkungan.

Semua narasumber sepakat bahwa kerangka hukum dan insentif pajak yang lebih baik akan membantu. Lembaga-lembaga filantropi juga perlu membenahi cara mereka menjalankan organisasi, mengadopsi pendekatan manajemen modern, dan lebih menunjukkan kesediaan untuk berkolaborasi dengan pelaku lain. Diperlukan peningkatan kapasitas bagi organisasi pemberi dana hibah dan LSM, serta lebih banyak investasi bagi organisasi pemberi hibah.

Filantropi berbasis keimanan

Pada tahun 2011, sebuah penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat hanya menghimpun sedikit dari dana zakat potensial. Salah satu penyebabnya adalah sebagian besar orang lebih suka memberikan sumbangan secara langsung, alih-alih melalui lembaga pengelola zakat, dan tidak menyadari manfaat yang lebih besar dari membayarkan zakat melalui lembaga pengelola.

Filantropi berbasis keimanan memang memiliki potensi untuk menjadi lebih progresif. Sayangnya, masyarakat menjadi semakin konservatif dan dalam lima tahun terakhir politik identitas semakin marak di Indonesia.

Wirausaha sosial dan investasi sosial

Indonesia merupakan negara berpenghasilan menengah yang merasakan kesenjangan yang makin lebar, terutama antara Indonesia bagian timur dan barat serta populasi kota dan pedesaan. Indonesia juga merupakan negara penghasil sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Masalah-masalah ini merupakan kesempatan bagi wirausaha sosial.

Untuk mewujudkan potensi ini, tentu diperlukan lebih banyak uang. Menemukan investor sosial yang bersedia berinvestasi dalam wirausaha sosial yang relatif kecil merupakan suatu masalah, namun peran hibah juga diperlukan. Bantuan teknis juga sama pentingnya, atau bahkan lebih penting. Isu lain adalah terkait menarik bakat.

Prospek untuk investasi sosial ke depannya tampak baik. Indonesia adalah pasar yang menguntungkan bagi investor sosial, dan ada banyak isu yang dapat ditangani. Diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai investasi sosial, karena masyarakat memahaminya sebagai bentuk investasi komersil

atau donasi. Selain itu, investor sosial lokal juga dibutuhkan, mengingat investor global umumnya tidak akan berinvestasi pada organisasi-organisasi kecil.

Derma pribadi

Potensi *crowdfunding* dan derma daring di Indonesia sangat besar. Penelitian oleh Baznas menunjukkan potensi derma sebesar Rp 200 triliun (USD14,3 juta), dengan asumsi setiap penduduk muslim membayar zakat sebesar 2,5 persen. Penelitian juga menunjukkan pertumbuhan pesat konsumen kelas menengah. YAPPIKA-ActionAid telah memperoleh 8.500 donatur reguler aktif sejak pertengahan 2016.

Agar potensi ini terwujud, dibutuhkan sejumlah hal. Membangun kepercayaan menjadi tantangan. Selain itu, ada tantangan terkait ekosistem pembayaran, dan bahwa mekanisme pembayaran tidak cocok untuk *telemarketing*. Tantangan lain adalah infrastruktur internet yang secara umum masih belum maju.

Derma untuk tujuan-tujuan keadilan sosial

Ada pula potensi bagi individu untuk berderma untuk tujuan-tujuan keadilan sosial jika tujuan-tujuan tersebut dikomunikasikan dengan lebih baik dan keluarannya dipahami dengan lebih baik. Sebagian besar orang tidak tahu apa itu hak asasi manusia, sehingga transisi dari konsep bersekolah ke konsep hak untuk bersekolah masih sulit dipahami. Pengurangan pajak untuk donasi juga akan menciptakan perubahan, khususnya untuk donatur-donatur besar.

Transisi dari konsep bersekolah ke konsep hak untuk bersekolah mungkin masih sulit dipahami bagi penderma di Indonesia, namun, seperti di negara-negara lain yang diteliti PSJP, derma pribadi merupakan sumber potensi terbaik untuk tujuan-tujuan berbasis hak dan keadilan sosial. Pemberian-pemberian bagi tujuan yang mungkin tidak disukai pemerintah tersebut dapat memperoleh legitimasi bila diberikan oleh banyak donor berskala kecil. Di negara di mana derma pribadi, baik untuk filantropi berdasarkan agama maupun perusahaan media untuk tujuan kemanusiaan, telah banyak dilakukan, potensinya pasti sangat besar.

Kontributor

- **Abbas Yahya** Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih – YPP
- **Alfatih Timur** Co-founder dan CEO Kitabisa.com
- **Amelia Fauzia** Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, pendiri Social Trust Fund
- **Amirul Hasan** Manajer komunikasi, Dompot Dhuafa
- **Arifin Purwakananta** Direktur Eksekutif, Baznas
- **Benedikta Atika** Anggota tim investasi, ANGIN
- **Erna Witoelar** Pendiri dan co-chair, Filantropi Indonesia
- **Eryanto Nugroho** Peneliti PSHK (Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
- **Felicia Hanitio** Djarum Foundation
- **Kamala Chandrakirana** Feminis aktivis HAM untuk keadilan dan demokrasi
- **Linda Hoemar Abidin** Bendahara – Dewan Eksekutif, Koalisi Seni Indonesia
- **Maria Anik Tunjung** Direktur eksekutif, Indonesia untuk Kemanusiaan
- **Okty Damayanti** Direktur, Yayasan Adaro
- **Paul Indra Collett** Kepala perencanaan strategis, Yayasan Tanoto
- **Romy Cahyadi** Co-founder Instellar dan UnLtd Indonesia
- **Suzanne Siskel** Mantan perwakilan Ford Foundation di Indonesia
- **Suzanty Sitorus** Badan Pengurus, Filantropi Indonesia
- **Suzy Hutomo** Pendiri dan mantan CEO The Body Shop Indonesia dan Ketua Badan Pengurus Greenpeace Asia Tenggara dan mantan Ketua Badan Pengurus Kehati
- **Sri Indiyastutik** Direktur penggalangan dana, YAPPIKA-Action Aid.